

**DAMPAK IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL TERHADAP DINAMIKA
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI BANTEN**

Dadang Hermawan¹ Dendi Riswandi² Mumu Zainal Mutaqin³
STAI Haji Agus Salim¹ Universitas Islam Depok² Universitas Mathla'ul Anwar³ Indonesia
Correspondence Author: dfdl2007@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze in depth the impact of halal tourism implementation on regional economic growth dynamics in the rich province of Banten, which has great opportunities to utilize halal tourism as a new catalyst for sustainable economic growth. It also seeks to identify how the development of a halal tourism ecosystem, which includes the provision of facilities and services in accordance with sharia principles, can increase the number of tourist visits and encourage investment in related sectors. The research method used is qualitative with a literature study type. This approach was chosen to comprehensively collect, review, and analyze various secondary data sources, such as previous research reports, scientific journals, official local government publications, and policies related to halal tourism and the regional economy in Indonesia, particularly in Banten Province. Through a literature study, researchers can map relevant concepts, theories, and empirical findings to build a strong analytical framework and identify patterns, trends, and gaps in the discussion of the contribution of the halal tourism sector to indicators of regional economic growth in Banten. The results of the discussion show that the implementation of halal tourism in Banten Province has had a positive and significant impact on accelerating regional economic growth. This strategy has succeeded in expanding the target market to domestic and global Muslim tourists who are sensitive to sharia aspects, which has led to an increase in foreign exchange and money circulation in the region. Furthermore, the development of halal tourism has clearly boosted the local economy, especially in the micro, small, and medium enterprises sector engaged in halal culinary, Muslim fashion, and handicraft products. This indicates that halal tourism not only increases revenue in the tourism sector but also drives diversification and resilience in the overall regional economy of Banten.*

Keywords: *Halal; Tourism; Regional Economy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi pariwisata halal terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten yang kaya, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pariwisata halal sebagai katalisator baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Serta berupaya mengidentifikasi bagaimana pengembangan ekosistem pariwisata halal, yang mencakup penyediaan fasilitas dan layanan sesuai prinsip syariah, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, mendorong investasi di sektor terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis secara komprehensif berbagai sumber data sekunder, seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah daerah, dan kebijakan terkait pariwisata halal dan ekonomi regional di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Melalui studi literatur, peneliti dapat memetakan konsep, teori, dan temuan empiris yang relevan untuk membangun kerangka analisis yang kuat, serta mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam pembahasan mengenai kontribusi sektor pariwisata halal terhadap indikator-indikator pertumbuhan ekonomi regional Banten. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal di Provinsi Banten memberikan dampak positif dan signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi regional. Strategi ini berhasil memperluas target pasar ke segmen wisatawan Muslim domestik dan global yang sensitif terhadap aspek syariah, yang berujung pada peningkatan devisa dan perputaran uang di daerah. Lebih lanjut, pengembangan pariwisata halal secara nyata mendorong penguatan ekonomi lokal, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

bergerak di bidang kuliner halal, fashion Muslim, dan produk kerajinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata halal bukan hanya meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi diversifikasi dan resiliensi ekonomi regional Banten secara keseluruhan.

Kata Kunci: Halal; Pariwisata; Ekonomi Regional.

PENDAHULUAN

Provinsi Banten, sebagai salah satu daerah pesisir dan dekat dengan pusat ekonomi, memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun, belum lama ini muncul wacana untuk mengembangkan pariwisata halal sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi regional. Implementasi pariwisata halal di Banten diharapkan mampu menarik wisatawan muslim yang mencari destinasi dengan fasilitas yang sesuai syariah, sekaligus mendorong multiplier effect ekonomi lokal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bahwa meskipun potensi pariwisata halal sangat besar, infrastruktur syariah seperti akomodasi halal, makanan halal, dan transportasi halal di Banten belum sepenuhnya berkembang.

Fenomena yang muncul dari kekurangan tersebut adalah partisipasi masyarakat lokal dalam ekosistem pariwisata halal masih terbatas. Banyak pelaku usaha kecil di Banten belum memanfaatkan branding halal sebagai nilai jual, dan belum ada sinergi kuat antara pemerintah daerah, pemangku pariwisata lokal, dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan ekowisata halal. Akibatnya, potensi pendapatan dari segmen wisatawan muslim belum ter-optimalisasi. Harapan dari implementasi pariwisata halal di Banten sangat tinggi. Pemerintah daerah dapat melihat halal tourism sebagai peluang strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak pariwisata, retribusi, dan kegiatan ekonomi terkait, seperti UMKM lokal syariah, industri kuliner halal, dan kerajinan khas Banten. Selain itu, pariwisata halal diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor perhotelan, transportasi, dan jasa wisata. Namun, kenyataannya di lapangan tidak selalu memenuhi harapan (Pratama, 2023).

Pariwisata halal di Banten berwujud dalam beberapa bentuk utama yang terintegrasi, yaitu wisata religi, yang sangat menonjol melalui kunjungan ke situs-situs bersejarah Islam seperti Masjid Agung Banten dan kompleks Banten Lama untuk ziarah dan edukasi sejarah. Selanjutnya, wisata alam dan bahari, yang berfokus pada destinasi seperti pantai Anyer dan Tanjung Lesung, di mana fasilitas pendukung seperti musala dan ketersediaan makanan halal diakomodasi. Selanjutnya, kuliner halal, yang melibatkan eksplorasi makanan dan minuman lokal Banten yang telah tersertifikasi halal.

Pariwisata halal merupakan konsep penyelenggaraan kegiatan wisata yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan layanan, fasilitas, dan pengalaman wisata. Dalam konteks ekonomi regional, pariwisata halal tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa layanan higienis, ramah keluarga, dan etis yang dapat diterima oleh wisatawan global. Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional, pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan pendapatan, kesempatan kerja, dan peningkatan penggunaan sumber daya lokal (Suryaman, 2022).

Sebagian destinasi wisata di Banten masih lebih fokus pada pariwisata konvensional alam, pantai, atraksi budaya dan belum diformalkan sebagai destinasi halal melalui regulasi maupun branding. Pariwisata halal bukan hanya soal keagamaan, tetapi juga strategi ekonomi yang inklusif dan semakin relevan di era pariwisata syariah. Dari sisi pertumbuhan ekonomi regional,

pariwisata halal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto Banten. Ketika wisatawan halal datang, pengeluaran mereka tidak hanya untuk tiket wisata, tetapi juga penginapan, makanan halal, transportasi, belanja lokal, dan oleh-oleh syariah, sehingga menciptakan rantai nilai ekonomi yang luas (Nuraini, 2019).

Hal ini menjadi bukti empiris bahwa model pariwisata halal dapat diterapkan dengan sukses di daerah-daerah lain, termasuk Banten. Potensi pariwisata halal di Banten akan sia-sia tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan. Strategi yang diperlukan yaitu pembuatan rute wisata halal di Banten, penyediaan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran, serta kampanye pemasaran yang menargetkan wisatawan muslim mancanegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) untuk menganalisis dampak implementasi pariwisata halal terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, regulasi, serta temuan empiris dalam literatur terkait pariwisata halal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal terakreditasi Sinta, buku akademik, laporan pemerintah, serta publikasi lembaga resmi yang relevan dengan tema penelitian (Sugiono, 2017).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen statistik pariwisata, laporan BPS, dan regulasi pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata halal di Banten. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang berfokus pada proses interpretasi, pengelompokan, dan sintesis data dari berbagai literatur. Langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berupa pemahaman menyeluruh mengenai sejauh mana pariwisata halal memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Banten berdasarkan referensi ilmiah yang telah ditelaah (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terkait Wisata Halal di Provinsi Banten

Halal di Indonesia mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Perpres nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan ini secara eksplisit menempatkan pariwisata halal sebagai salah satu program prioritas nasional di bawah pilar pengembangan destinasi pariwisata unggulan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Penekanan dalam RPJMN adalah pada percepatan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan branding destinasi yang ramah terhadap wisatawan Muslim.

Kebijakan ini menjadi mandat dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Banten, untuk menyelaraskan rencana pembangunan mereka dengan target nasional tersebut. Sebagai respons terhadap mandat RPJMN 2020–2024, Pemerintah Provinsi Banten mengintegrasikan prioritas wisata halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Integrasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah, program kerja dinas terkait dan proyek pembangunan infrastruktur selaras dengan visi nasional. Dalam RPJMD Banten, pengembangan

pariwisata halal diartikan sebagai upaya memanfaatkan potensi lokal, khususnya warisan sejarah Islam dan kawasan pantai, dengan memastikan tersedianya fasilitas syariah yang dibiayai atau didukung melalui skema pendanaan daerah (Subagiyo & Rizaldi, 2022).

Dalam mewujudkan visi Banten sebagai destinasi pariwisata halal, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan kebijakan kolaboratif yang melibatkan tiga pilar utama yaitu Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kolaborasi ini esensial karena setiap lembaga memiliki peran unik, mulai dari penetapan regulasi dan fasilitasi anggaran oleh Pemerintah, penetapan fatwa dan pemeriksaan oleh MUI (melalui LPPOM-nya), hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Kebijakan ini memastikan bahwa proses sertifikasi bagi hotel, restoran, dan objek wisata tidak hanya memenuhi aspek legalitas negara, tetapi juga diterima secara keagamaan sesuai dengan standar syariah yang ketat

Tujuan utama dari kebijakan kolaborasi ini adalah untuk memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan pariwisata di Banten bebas dari unsur haram, seperti alkohol, bahan baku non-halal, atau kontaminasi silang. Melalui pengawasan dan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh LPPOM MUI, restoran dan hotel didorong untuk mematuhi standar kehalalan yang mencakup bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian. Khususnya bagi restoran dan hotel di kawasan unggulan seperti Anyer dan Carita, sertifikasi ini menjadi bukti komitmen daerah dalam menyediakan akomodasi dan kuliner yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip Muslim-friendly tourism (Rizal & Amin, 2023).

Untuk memperluas jangkauan sertifikasi dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, kebijakan kolaborasi ini seringkali mencakup program dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Koperasi atau Dinas Pariwisata, mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis (self-declare atau bantuan biaya) bagi UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan souvenir. Kebijakan ini tidak hanya menghilangkan hambatan biaya yang sering dihadapi UMKM, tetapi juga mempercepat terbentuknya ekosistem pariwisata halal yang menyeluruh, di mana wisatawan dapat dengan mudah menemukan produk halal mulai dari tingkat pedagang kaki lima hingga hotel bintang lima. Kebijakan selanjutnya, yaitu membuat masterplan ekonomi Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan kerangka kebijakan nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

Pemerintah Provinsi Banten mengimplementasikan kebijakan ini dengan menargetkan beberapa kawasan pantai utama, seperti Pantai Anyer dan Carita, untuk dikembangkan sebagai "halal tourism destination." Pengembangan ini bukan sekadar branding, melainkan upaya konkret untuk melengkapi fasilitas pariwisata agar memenuhi kriteria syariah, seperti penyediaan restoran dan katering bersertifikasi halal, akomodasi dengan fasilitas ibadah memadai (musala dan arah kiblat), serta pemisahan waktu atau area rekreasi yang menjamin privasi bagi keluarga Muslim. Integrasi ini sejalan dengan arahan Kemenparekraf untuk memastikan bahwa seluruh rantai nilai pariwisata, mulai dari transportasi hingga atraksi, mendukung prinsip-prinsip ramah Muslim .

Penerapan kebijakan pariwisata halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menarik wisatawan sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyediakan produk halal. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi pengawasan, biaya sertifikasi, dan edukasi pelaku usaha. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, MUI, dan asosiasi industri pariwisata untuk memastikan bahwa visi MEKSI dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di destinasi seperti Anyer dan Carita (Wardhani, 2023).

Lebih lanjut, Pemerintah Banten secara konsisten menjalankan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Kebijakan ini diwujudkan melalui program pelatihan dan bimbingan teknis yang fokus pada standar layanan syariah bagi pelaku industri, mulai dari pemandu wisata hingga staf hotel. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar kehalalan produk, tetapi juga sesuai dengan etika dan tata krama yang Islami.

Infrastruktur dan Dukungan Ekosistem Pariwisata Halal di Provinsi Banten

Dukungan infrastruktur pariwisata halal berupa penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, merupakan pilar dalam menjamin kualitas layanan pariwisata halal di suatu destinasi. Ketersediaan fasilitas ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi indikator utama keramahtamahan destinasi terhadap wisatawan Muslim. Kualitas fasilitas ibadah harus diperhatikan secara detail, meliputi kebersihan tempat wudu, ketersediaan alat salat yang layak, serta penentuan arah kiblat yang akurat. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas ibadah di destinasi wisata utama, seperti taman nasional, pantai, atau pusat perbelanjaan, secara langsung meningkatkan daya tarik destinasi tersebut bagi pasar global Muslim yang terus berkembang.

Lebih lanjut, lokasi musala tidak boleh tersembunyi atau terlalu jauh dari pusat keramaian, melainkan harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan mudah ditemukan melalui penanda yang jelas. Studi menunjukkan bahwa wisatawan Muslim sangat menghargai kemudahan dalam menunaikan kewajibannya tanpa harus mengorbankan waktu berlibur, sehingga ketersediaan fasilitas ibadah yang representatif berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak pengelola wisata dapat menjadikan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur ibadah sebagai prioritas dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal. Langkah ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga penetapan standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan musala dan masjid selalu dalam kondisi prima. Komitmen ini merupakan dukungan ekosistem yang vital, menunjukkan keseriusan Banten sebagai destinasi yang mengakomodasi kebutuhan spiritual wisatawan. Dengan demikian, kualitas infrastruktur ibadah yang unggul akan memperkuat branding Banten sebagai destinasi Muslim friendly yang kompetitif (Hidayah, 2020).

Infrastruktur lainnya yaitu sertifikasi halal untuk sektor akomodasi, seperti hotel, resort, dan penginapan, adalah langkah krusial dalam mewujudkan ekosistem pariwisata halal di Provinsi Banten. Sertifikat ini menjadi penjamin bagi wisatawan Muslim bahwa seluruh aspek layanan mulai dari penyediaan makanan dan minuman, fasilitas ibadah yang higienis, hingga kebijakan kebersihan dan etika pelayanan telah memenuhi standar syariah yang ditetapkan. Dorongan dan fasilitasi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pelaku usaha akomodasi termotivasi untuk mengikuti proses sertifikasi yang ketat. Proses ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas pasar hotel ke segmen wisatawan Muslim domestik dan mancanegara, yang kini semakin selektif dalam memilih tempat menginap (Astuti & Fathoni, 2021).

Untuk mendorong percepatan sertifikasi, diperlukan adanya program sosialisasi dan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi para pengelola akomodasi di Banten. Fasilitasi

bisa berupa insentif, subsidi biaya sertifikasi, atau penyederhanaan prosedur yang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Standar akomodasi halal mencakup banyak aspek di luar makanan, seperti memastikan tidak adanya konten yang bertentangan dengan syariah dalam hiburan yang disediakan, serta menyediakan sarana kamar mandi yang memenuhi aspek kebersihan thaharah. Penguatan ekosistem pariwisata halal di Banten melalui sertifikasi akomodasi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya sekadar kepatuhan. Akomodasi yang telah bersertifikat halal dapat dipromosikan secara khusus dalam paket wisata, menjadikannya nilai jual unik bagi Banten yang memiliki potensi wisata bahari dan religi yang besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, dan asosiasi perhotelan menjadi kunci untuk memastikan implementasi standar halal berjalan efektif dan efisien. Upaya ini konsisten dengan rekomendasi bahwa dukungan kelembagaan yang kuat mutlak diperlukan dalam menciptakan rantai nilai pariwisata halal yang terintegrasi dan berkualitas (Saputra & Wardhana, 2020).

Dukungan infrastruktur lainnya yaitu pengembangan destinasi ramah Muslim (DRM) di Provinsi Banten memerlukan identifikasi kawasan wisata yang secara intrinsik memiliki potensi untuk memenuhi kriteria halal dan kebutuhan wisatawan Muslim. Ini berarti memilih kawasan yang tidak hanya indah, tetapi juga mudah diintegrasikan dengan fasilitas ibadah, kuliner halal, dan norma-norma kesopanan syariah. Misalnya, destinasi yang berbasis wisata religi seperti Banten Lama, atau kawasan alam yang pengelolaannya memungkinkan penambahan infrastruktur ramah Muslim.

Identifikasi ini menjadi fondasi bagi perencanaan tata ruang pariwisata yang memprioritaskan penyediaan layanan sesuai dengan Indeks Pariwisata Muslim Global guna memastikan daya saing di pasar internasional. Pengembangan ini mencakup empat aspek utama yakni aksesibilitas, akomodasi, atraksi, dan amenitas. Aspek amenitas, khususnya dapat diperkuat dengan membangun fasilitas pendukung thayyib dan halal, termasuk toilet yang bersih, area rekreasi keluarga yang menyediakan privasi, serta memastikan atraksi budaya yang disajikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Keberhasilan pengembangan DRM di Banten sangat bergantung pada dukungan ekosistem multisektor. Tidak hanya pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata, tetapi juga masyarakat lokal harus terlibat dalam proses edukasi dan implementasi hospitality yang ramah Muslim. Pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, etika berpakaian, dan penyediaan produk lokal halal akan memperkuat citra destinasi secara keseluruhan. Dengan adanya komitmen kolektif ini, kawasan wisata di Banten tidak hanya menjadi sekadar tempat berlibur, tetapi juga menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan meyakinkan bagi wisatawan Muslim. Integrasi ini diharapkan mampu menjadikan Banten sebagai destinasi wisata halal unggulan.

Dampak Implementasi Pariwisata Halal Terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pariwisata halal di Provinsi Banten memiliki potensi untuk menjadi generator utama peningkatan devisa dan PAD. Wisatawan terutama yang berasal dari pasar internasional mencari paket layanan premium yang menjamin kenyamanan spiritual. Kontribusi langsung dari kunjungan ini dapat diukur melalui penerimaan pajak hotel, restoran, tiket masuk destinasi, serta retribusi pariwisata lainnya. Ketika fasilitas dan layanan telah tersertifikasi halal, hal ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang memungkinkan pemerintah daerah mengenakan pungutan dan retribusi secara optimal, sekaligus menjamin legalitas operasional usaha. Pengelolaan pariwisata halal yang efektif juga berdampak pada peningkatan perputaran uang di

tingkat regional. Devisa yang dibawa oleh wisatawan internasional akan dikonversi dan diserap oleh perekonomian lokal melalui berbagai transaksi, mulai dari pembelian produk UMKM halal, penggunaan jasa transportasi, hingga pemesanan akomodasi bersertifikat. Peningkatan transaksi ini tidak hanya memperkaya PAD melalui pajak daerah, tetapi juga secara tidak langsung mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas layanan oleh pelaku usaha lokal (Suryawan & Utami, 2022).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten dapat menetapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendukung implementasi pariwisata halal sebagai strategi peningkatan PAD. Kebijakan ini termasuk memfasilitasi kemudahan investasi di sektor halal dan memastikan sistem pemungutan pajak dan retribusi berjalan transparan dan efisien. Penilaian kontribusi ini harus dilakukan secara berkala dan terukur, memisahkan data penerimaan dari wisatawan Muslim dengan data umum. Dengan memposisikan pariwisata halal sebagai unggulan, Banten dapat secara sistematis meningkatkan penerimaan daerah, yang pada akhirnya dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal (Darmawan & Kusuma, 2020).

Dampak selanjutnya, penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan jenis pekerjaan yang ada di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Tuntutan akan layanan bersertifikat halal membuka peluang bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik, seperti chef dan juru masak bersertifikat halal, auditor internal halal di hotel, serta pemandu wisata yang menguasai etika dan panduan perjalanan Muslim. Kebutuhan untuk menyediakan fasilitas ibadah, kuliner, dan akomodasi yang memenuhi standar syariah menciptakan permintaan untuk posisi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia secara massal. Perluasan jenis lapangan kerja juga terjadi pada sektor-sektor pendukung di luar akomodasi dan kuliner. Sektor transportasi, misalnya, memerlukan pengemudi yang memahami jadwal salat dan rute menuju fasilitas ibadah, menciptakan peluang bagi jasa transportasi ramah. Demikian pula, sektor UMKM yang memproduksi souvenir dan produk oleh-oleh lokal didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasaran produk bersertifikat. Analisis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal memiliki elastisitas serapan tenaga kerja yang tinggi, terutama di daerah yang berbasis komunitas dan pedesaan, asalkan didukung oleh program pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan (Wibowo & Haryadi, 2021).

Dengan demikian, pemerintah daerah Banten perlu menyusun program pelatihan kejuruan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri pariwisata halal. Pelatihan harus ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis bagi masyarakat lokal agar mereka dapat mengisi peluang kerja yang muncul. Fokus pada pariwisata halal tidak hanya bertujuan meningkatkan PDRB, tetapi juga menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran di tingkat regional. Keberhasilan dalam menghubungkan penawaran tenaga kerja dengan permintaan pasar halal akan memperkuat ekosistem ekonomi Banten secara keseluruhan dan memastikan manfaat ekonomi dari pariwisata halal didistribusikan secara adil dan merata.

Dampak selanjutnya, menjadi katalisator signifikan bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, terutama di sektor kuliner, souvenir, dan kerajinan, menciptakan permintaan pasar baru yang spesifik. UMKM yang sebelumnya beroperasi di pasar lokal kini didorong untuk menyesuaikan proses produksi dan mengurus sertifikasi halal agar dapat masuk ke dalam rantai pasok hotel, restoran, dan toko souvenir yang melayani wisatawan Muslim. Peningkatan ini tidak

hanya terukur dari peningkatan jumlah UMKM yang tersertifikasi, tetapi juga dari peningkatan volume penjualan dan pendapatan mereka. Penelitian menegaskan bahwa sertifikasi halal pada produk UMKM memberikan keunggulan kompetitif dan akses yang lebih luas ke pasar wisatawan.

Dampak positif pariwisata halal terhadap UMKM juga terlihat dari upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk. Untuk memenuhi kriteria *thayyib* (baik) dan halal yang diminta oleh industri pariwisata, UMKM terdorong untuk meningkatkan kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan produk. Pemerintah daerah dan lembaga terkait memainkan peran penting dalam memfasilitasi peningkatan ini melalui program pelatihan manajemen bisnis, bantuan permodalan, dan pendampingan sertifikasi halal yang disubsidi. Keberhasilan integrasi UMKM dalam rantai pasok pariwisata halal secara langsung memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi regional Banten. Peningkatan pendapatan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata halal harus secara eksplisit menargetkan dan mengukur kontribusi UMKM melalui indikator seperti peningkatan omzet dan perluasan kapasitas produksi. Komitmen untuk memberdayakan UMKM melalui pariwisata halal adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata didistribusikan secara merata, menjadikan pariwisata halal sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Pariwisata halal memiliki dampak signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten karena strategi ini secara efektif memperluas basis pasar pariwisata dengan menarik wisatawan domestik dan internasional yang mencari layanan dan fasilitas makanan halal, waktu salat, dan akomodasi yang bersahabat. Dampak pariwisata halal ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan, tetapi juga mendorong investasi dalam infrastruktur dan bisnis lokal (UMKM) yang terintegrasi dengan pariwisata halal. Sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D., & Fathoni, M. A. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Akomodasi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 1–10.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Pilar Pengembangan Pariwisata Halal*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications.
- Darmawan, R., & Kusuma, A. T. (2020). Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Halal. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(1), 45–58.
- Hidayah, N. N., & Muhtadi, R. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Konsep Pentahelix di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 5(2), 115–125.

- Hakim, L., & Mustofa, A. (2022). Dampak Sertifikasi Halal terhadap Keunggulan Kompetitif dan Peningkatan Penjualan UMKM Kuliner di Destinasi Pariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45–60. 150–165.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Nuraini, E. (2019). Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah. Baskara: *Journal of Business and Entrepreneurship*. Volume 1 No 2, e-ISSN: 2623-0089.
- Richardson, H. (1973). *Regional Economics*. Urbana: University of Illinois Press.
- Rizal, A., & Amin, S. (2023). Implementasi Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal Pantai Anyer Banten. *Jurnal Pariwisata Syariah dan Ekonomi Islam*, 8(1), 45-60.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subagiyo, R., & Rizaldi, A. (2022). Sinkronisasi Kebijakan Pariwisata Halal: Analisis Keterkaitan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah*, 14(3), 205-220.
- Sihombing, F. E., & Mulyadi, D. (2020). Peran Strategis UMKM dalam Rantai Nilai Pariwisata Halal dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan*, 4(3), 201–215.
- Saputra, G. H., & Wardhana, A. A. (2020). Analisis Dukungan Kelembagaan dan Rantai Nilai dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10(2), 175–186.
- Suryawan, I. G. A., & Utami, N. W. (2022). Peran Sektor Pariwisata Halal dalam Menciptakan Multiplier Effect Ekonomi Regional. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 88–101.
- Pratama, F. A., & Kusuma, D. (2023). Dampak Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1),
- Wardhani, N. (2023). Strategi Pemerintah Banten dalam Mengintegrasikan Pariwisata Halal ke dalam Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, 16(1), 45-60.
- Wibowo, R., & Haryadi, P. (2021). Elastisitas Serapan Tenaga Kerja dalam Pengembangan Pariwisata Halal dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 6(2), 145–160.
- Wijaya, D. P., & Santoso, D. (2022). Dampak Sertifikasi Halal terhadap Tingkat Okupansi dan Daya Saing Hotel dalam Konteks Pariwisata Syariah. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 7(1), 1–16.